

**TANTANGAN KOLABORASI NATIONAL PLASTIC ACTION PARTNERSHIP (NPAP)-GLOBAL PLASTIC ACTION PARTNERSHIP (GPAP) DALAM PENANGANAN SAMPAH PLASTIK DI PERAIRAN INDONESIA (2019-2025): PERSPEKTIF ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL**

**Maisarah**

Universitas Abdurrah  
Maisarah17@univrab.ac.id

***Abstrak***

Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua didunia setelah Cina dan di perkirakan akan terjadi peningkatan jumlah sampah plastik hingga 780.000 ton setiap tahunnya hingga 2025. Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengurangi 70% sampah plastik di perairan dari tahun 2019 sampai tahun 2025 pada pertemuan *World Economic Forum*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah melalui wawancara *semi-structured* dan juga studi kepustakaan dengan mengambil data dari jurnal, buku dan berita media. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pluralism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai target pengurangan sampah plastik sebesar 70% dari tahun 2018-2025 Indonesia menerapkan kolaborasi *multi* aktor yang berada didalam suatu platform kerjasama *National Plastic Action Plan*. Platform kerjasama *multi* aktor ini adalah tempat berkumpul dan berkolaborasinya aktor-aktor dari pemerintah, pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil. Penelitian ini menemukan bahwa dengan menganalisa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kolaborasi NPAP, khususnya terkait tantangan tata kelola, program dan kebijakan NPAP, dukungan publik, serta pendanaan, maka kolaborasi NPAP sulit untuk mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu berkurangnya 70% sampah plastik diperairan Indonesia pada tahun 2025.

Keywords: Indonesia, sampah plastik, kolaborasi, multi-aktor, tantangan-tantangan

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dari data yang dirilis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan jumlah 16.056 pulau yang telah diberi nama serta terverifikasi oleh Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada awal Tahun 2017 (Ambasari, 2017), dengan jumlah total 17.499 pulau yang ada di Indonesia. Luas laut yang dimiliki 3,25 juta km<sup>2</sup> dan 2,55 juta km<sup>2</sup> merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sedangkan wilayah daratan Indonesia hanya sekitar 2,01 juta km<sup>2</sup> (Pratama, 2017). Dari data luas wilayah darat dan perairan Indonesia serta pertumbuhan penduduk yang pesat setiap tahunnya, akan menimbulkan dampak tantangan kepada setiap aktor untuk mengelola lingkungan menjadi berkelanjutan.

Tantangan yang mulai dirasakan adalah isu lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik sekali pakai. Hampir semua aktivitas manusia di dunia tidak terlepas dari plastik, karena sifat penggunaan plastik dianggap praktis, mudah dan ekonomis. Plastik sekali pakai sudah menjadi kebiasaan dan sulit untuk dihindari, sehingga pemakaian plastik setiap hari akan meningkat dan tanpa disadari sampah plastik akan terus meningkat ketika tidak dikelola dengan benar oleh setiap pengguna. Seperti perkiraan dari *World Economic Forum* (WEF), pada tahun 2050. Akan lebih banyak jumlah sampah plastik sekali pakai yang ada di perairan dari pada ikan sebagai penghuni asli lautan (Agustina, 2019).

Sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang terkesan baru, mulai diperdebatkan pada abad ke-21, dengan berbagai dampak kompleks yang dirasakan oleh masyarakat lokal dan global. Pada awalnya plastik diproduksi untuk menyelamatkan bumi dan lingkungan karena penggunaan kantong kertas diproduksi dari pohon yang mengakibatkan penipisan sumber daya alam dan dianggap tidak berkelanjutan. Maka dilakukan produksi plastik untuk mempermudah aktivitas manusia di bumi dan juga dengan tujuan untuk melindungi lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jenna Jambeck dari Universitas Georgia pada Tahun 2015 menyatakan peringatan terhadap negara-negara pembuang sampah plastik terbanyak di perairan. Dari data estimasi total 275 juta metrik ton (MT) sampah plastik dihasilkan dari 192 negara tahun 2010 di seluruh dunia, dengan perkiraan antara 4,8-12,7 juta MT masuk kelaut lepas. Dalam penelitian tersebut, Indonesia berada pada posisi kedua di bawah Cina dengan menyumbang sebesar 3,2 juta ton dan Filipina berada pada posisi ketiga yaitu sebesar 1,9 juta ton (Ridzki, 2015). Indonesia merupakan negara berkembang di Asia yang memiliki batas wilayah secara langsung dengan laut. Lingkungan hidup dan perairan selalu menjadi tempat pembuangan akhir limbah sampah rumah tangga, sehingga menyebabkan kerusakan pada lingkungan, kerugian pada ekosistem laut, ekonomi dan kesehatan generasi selanjutnya.

Catatan buruk yang dimiliki Indonesia sebagai negara penyumbang kedua polusi sampah plastik di perairan dunia, tidak hanya kesalahan limbah rumah tangga, tetapi peranan besar dari limbah industri juga menyumbang polusi sampah. Kapasitas produksi industri di Indonesia harus melewati tahap perundang-undangan seperti PP No.82/2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran. Pemerintah wajib melakukan monitoring terhadap tindak kejahatan terhadap aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan (Ridzki, 2015). Undang-undang yang mengatur perihal lingkungan di Indonesia sudah sangat banyak, tetapi pelaksanaan menjadi tanda tanya besar.

*National Plastic Action Partnership* (NPAP) merupakan wadah untuk mengumpulkan *multi*-aktor, seperti aktor-aktor pembuat kebijakan, para ahli, korporasi dan organisasi non-pemerintah serta masyarakat sipil secara bersama-sama mencapai target nasional yaitu mengurangi sampah plastik di perairan Indonesia hingga 70 % pada tahun 2025 serta bebas polusi sampah plastik pada tahun 2040 (WRI, 2019). NPAP juga merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan *Global Plastic Action Partnership*(GPAP)di bawah naungan *World Economic Forum* (Agustina, 2019). *Nasional Plastic Action Partnership* (NPAP) secara resmi diluncurkan pada awal tahun 2019 tepatnya 11 Maret di Jakarta, Indonesia.

*Global Plastic Action Partnership* (GPAP) adalah platform *multi*-aktor yang berdedikasi dalam menerjemahkan komitmen bersama untuk mengurangi polusi sampah plastik melalui tindakan nyata. GPAP bertujuan membentuk dunia yang berkelanjutan secara inklusif melakukan pemberantasan polusi plastik di tingkat nasional dan global. Secara resmi GPAP diluncurkan pada september 2018 melalui forum ekonomi dunia terhadap dampak pembangunan berkelanjutan, didirikan oleh berbagai mitra publik dan swasta dalam percepatan respon global terhadap krisis polusi plastik yang sudah membengkak. Pada Maret 2019, GPAP mengumumkan bahwa mitra nasional yang pertama yaitu pemerintah Indonesia melalui NPAP dengan penetapan target pengurangan kebocoran plastik di perairan mencapai 70 % pertahun 2025 (Hughes, 2020).

Untuk menangani sampah plastik yang menjadi permasalahan lingkungan dan perairan di Indonesia pemerintah melakukan kolaborasi dengan *Global Plastic Action Partnership* (GPAP) sehingga membentuk *National Plastic Action Partnership* (NPAP) Indonesia. Permasalahan selanjutnya ada pada tantangan implementasi dari NPAP dalam aksi nasional penanganan sampah plastik di perairan Indonesia rentang Tahun 2019-2025. Penelitian ini berfokus pada tantangan kolaborasi NPAP-GPAP sendiri untuk mengurangi sampah plastik di perairan Indonesia hingga 70 % pada Tahun 2025 (WRI, 2019).

## **STUDI LITERATUR**

Pertama; penelitian yang dilakukan oleh Riski Dermawan Tahun 2019 dengan judul "Securitizing The Environment: A Case of Marine Debris in Indonesia". Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini melihat proses sekuritisasi dari isu sampah di laut melalui pemerintah Indonesia. Untuk menjelaskan permasalahan tersebut, peneliti menggunakan analisis sekuritisasi tentang keamanan lingkungan hidup. Gambaran dari penelitian ini menunjukkan keamanan lingkungan yang terancam oleh puing-puing sampah di laut Indonesia mulai dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga pada saat pemerintahan Joko Widodo yang bermain peran terhadap perkembangan undang-undangan keamanan khususnya lingkungan hidup. Selama tujuh tahun terakhir, permasalahan limbah laut mengancam keamanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan, undang-undang sekuritisasi tidak memberikan hasil yang jelas karena tidak memiliki parameter yang kuat untuk mengukur efektivitas keamanan lingkungan dari dampak puing-puing sampah yang ada di laut Indonesia. Sehingga penelitian ini merekomendasikan pengembangan parameter yang lebih komprehensif untuk menjadi standar pengukuran dampak keamanan lingkungan dan respon masyarakat melalui statistik survei untuk menyediakan pemahaman yang lebih dalam pada masalah ini kepada masyarakat (Dermawan, 2019).

Kedua; penelitian yang dilakukan oleh Cecep Hermawan dan Hasan Sidik tahun 2019 dengan judul “Momentum Diplomasi Maritim Indonesia: Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut 2019-2024”. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data berupa analisis wacana untuk menganalisis pembentukan momentum. Penelitian ini menggunakan teori Diplomasi Maritim yang dikemukakan Christian Le Miere, namun untuk menganalisis diplomasi maritim peneliti menggunakan teori Momentum Diplomatik dari G.R. Berridge untuk menganalisis proses perubahan kebijakan nasional menjadi strategi diplomasi. Penelitian ini bukan hanya merupakan sebuah instrumen diplomasi maritim Indonesia, namun berbasiskan UNCLOS. Indonesia mendapat gelar sebagai penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia membuat Indonesia mendapat tekanan yang berasal dari negara-negara sahabat, organisasi internasional pemerintah dan non-pemerintah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberhasilan menggunakan momentum diplomatik maritim Indonesia (Hermawan & Sidik, 2019).

Ketiga; penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Busyrol Fuad tahun 2020 dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik Di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM)”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan prinsip standar dalam Konvensi Basel untuk mengurai persoalan limbah sampah plastik. Penelitian ini melihat bagaimana tanggung jawab negara dan korporasi terhadap permasalahan HAM khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kasus impor limbah plastik di Indonesia. Salah satu bentuk kewajiban negara terhadap HAM, bahwa negara harus melakukan pengawasan yang memadai dalam memenuhi kriteria kerjasama melalui kontrak, mengatur perusahaan untuk menyediakan layanan yang mungkin berdampak terhadap HAM. Menghentikan impor limbah plastik yang dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang agar permasalahan limbah plastik dapat segera teratasi sehingga mampu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Penelitian ini menunjukkan hasil dari amandemen Konvensi Basel masih meninggalkan titik kritis karena tidak memberikan beban tanggung jawab terhadap korporasi dalam mencegah peredaran limbah plastik dunia yang terlibat dalam rantai pasok HAM (M. B. Fuad, 2020).

Keempat; penelitian dilakukan oleh Nehru Anggita Tahun 2018 dengan judul penelitian “Analisis Sikap Good Faith Non-Compliance Indonesia dalam Upaya Implementasi Konvensi Basel”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan oleh Ronald B. Mitchell di sandingkan dengan analisis umum terkait penanganan perpindahan limbah B3 oleh Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penanganan perpindahan ilegal limbah B3 sudah cukup baik, berdasarkan larangan impor limbah B3 melalui UU No. 32 Tahun 2009 dan permendag No. 39 Tahun 2009. Penerapan mekanisme pengawasan oleh KLH bersama Bea Cukai membuat aliran limbah B3 ilegal dapat terungkap rentang Tahun 2009-2012. Setiap kasus dapat ditindak dan hampir semuanya dilakukan re-ekspor terhadap negara-negara yang melakukan impor ilegal seperti Inggris dan Belanda. Peneliti mendapatkan kesesuaian antara penjelasan oleh Mitchell dengan perilaku Indonesia. Bahwa Indonesia juga melakukan ketidak patuhan dalam penanganan perpindahan ilegal limbah B3 dengan cara mengimpor (Anggita, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena memiliki fitur yang lebih umum, eksplorasi, dinamis, dan fleksibel. Pendekatan kualitatif memiliki sifat mengembangkan teori dan menggambarkan realita serta fenomena permasalahan penelitian. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif memberikan gambaran luas tentang permasalahan yang diangkat serta menjadi sebuah kesimpulan sementara. Menurut Cresswell (1994) “penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami problem sosial yang berkaitan dengan aktivitas manusia, didasarkan atas membangun gambaran holistik yang rumit, dengan membentuk kata, menggambarkan pandangan secara terperinci mengenai informasi problem dan dilakukan secara alami” (Cresswell, 1994).

## **PEMBAHASAN**

### **Tantangan Kolaborasi NPAP dan GPAP Dalam Penanganan Sampah Plastik di Perairan Indonesia Tahun 2019-2025**

#### **Tantangan Kolaborasi NPAP Perspektif Aktor Organisasi Masyarakat Sipil**

Organisasi masyarakat sipil merupakan wadah untuk mengumpulkan sekelompok masyarakat yang cenderung memiliki kesamaan pandangan terhadap isu-isu yang dianggap menjadi masalah. Aktor ini akan terus berkompetisi mempengaruhi masyarakat, pemerintah, organisasi lain dan swasta untuk mengetahui dan menjalankan apa yang menjadi tujuan organisasi. Permasalahan yang diangkat pun beragam tergantung dari keadaan permasalahan (Goran, 1997).

Organisasi masyarakat juga bisa dianggap sebagai wadah menyampaikan aspirasi masyarakat yang lebih dekat. Organisasi masyarakat juga bisa dianggap lebih efektif dalam menampung aspirasi ini, baru kemudian aspirasi disampaikan kepada pemangku kepentingan melalui organisasi. Organisasi masyarakat juga memiliki potensi dalam mengawal demokrasi yang ada di negara Indonesia dan juga negara-negara demokrasi lainnya yang ada didunia. Karena setiap permasalahan yang ada di masyarakat justru lebih diketahui oleh organisasi masyarakat dari pada pemerintah.

#### ***World Resources Institute (WRI) Indonesia***

Aktivitas yang dilakukan oleh WRI sudah ada sejak 1990-an dimulai dengan mitra dalam negeri dengan sebagian besar membahas isu kehutanan. WRI dikenal Pemerintah Indonesia sebagai organisasi global yang melakukan penelitian berkualitas tinggi berdasarkan fakta dan data yang di percaya. WRI sudah banyak menjalankan proyek penelitian ilmiah di Indonesia seperti *Governance of Forest Initiative*, *Forest and landscape in Indonesia*, dan *Global Forest watch* (WRI Indonesia, 2017).

Beberapa publikasi WRI tentang Indonesia juga telah ada dipublikasikan sejak akhir 1990-an hingga saat ini seperti penebangan hutan ilegal, perubahan tutupan pohon, status hutan Indonesia, kebakaran hutan, klarifikasi tata guna lahan dan identifikasi lahan terdegradasi untuk kelapa sawit berkelanjutan. Dari dimulainya aktivitas penelitian ilmiah yang dilakukan oleh WRI di Indonesia serta ikut membantu pemerintah dalam Rencana Pengurangan Gas Rumah Kaca Nasional melalui pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Mencakup komoditas

berkelanjutan lain seperti *Roundtable on Sustainable Palm Oil, Consumer Goods Forum* dan *Tropical Forests Alliance* (WRI Indonesia, 2017).

Kemudian pada Tahun 2013, WRI Indonesia didirikan sebagai langkah untuk keberadaan yang lebih kuat dan formal. Pada Tahun 2014 WRI Indonesia didirikan dalam bentuk yayasan. Sebagai sebuah badan hukum, WRI Indonesia mempererat kemitraan dengan lembaga pemerintah, perusahaan dan institusi penelitian. WRI Indonesia memiliki tujuan membawa inovasi dalam setiap penelitian dan sektor bisnis, menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkelanjutan. Melalui tujuan ini WRI Indonesia bekerjasama dengan pemerintah, swasta serta organisasi masyarakat sipil untuk mengubah gagasan menjadi aksi nyata (WRI Indonesia, 2017).

Berdasarkan dari sejarah dimulainya kegiatan dan proyek tentang isu lingkungan hidup yang dilakukan oleh WRI di Indonesia, maka sudah terbentuk WRI Indonesia yang secara langsung lebih formal dengan tujuan untuk mempermudah WRI melangkah lebih luas. Seperti melakukan berbagai riset dan penelitian ilmiah, bekerjasama dengan pemangku kepentingan, pihak swasta-bisnis dan organisasi masyarakat sipil. Tentunya setiap kerjasama yang dilakukan oleh WRI Indonesia tidak terlepas dari isu lingkungan hidup dan untuk menjamin kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

Saat ini permasalahan lingkungan tidak lagi hanya seputar kebakaran hutan, penebangan hutan ilegal, gas rumah kaca dan perkebunan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan. Tapi permasalahan yang di nilai spele dari kegiatan produksi dan konsumsi rumah tangga yang tidak lepas dari plastik dan kemudian menghasilkan sampah plastik hingga sampai kepada perairan di Samudra Pasifik. Untuk itu, WRI Indonesia ikut serta dalam memerangi pencemaran sampah plastik ini dengan mendukung program NPAP sebagai organisasi yang berkolaborasi dengan pemerintah khususnya kementerian yaitu untuk mengurangi sampah plastik hingga 70% tahun 2025.

WRI Indonesia merupakan sekretariat bagi NPAP, yaitu dengan tujuan mempertemukan para pembuat kebijakan, ahli, sektor bisnis, pengusaha dan organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama mengurangi 70% sampah plastik di perairan Indonesia pada 2025 (Kirana Dkk, 2020). WRI Indonesia juga merupakan platform netral yang bertanggung jawab melakukan koordinasi dan memberikan fasilitas kemitraan kepada publik-swasta dalam membebaskan polusi limbah plastik, khususnya polusi plastik di sungai, delta, dan laut. Peran WRI Indonesia sebagai sekretariat NPAP adalah untuk memungkinkan NPAP beroperasi dengan mekanisme mengurangi polusi sampah plastik di Indonesia hingga 70% tahun 2025 bisa terlaksana dengan baik (Astriani, 2021).

Berdasarkan dari pandangan dan peran WRI Indonesia terhadap NPAP bahwa terdapat tantangan-tantangan dalam implementasi pengurangan sampah plastik di perairan Indonesia hingga mencapai 70% tahun 2025. Tantangan ini khususnya seperti tantangan tantangan tata kelola yang baik (*good governance*), tantangan kebijakan dan program NPAP, tantangan dukungan publik dan tantangan pendanaan (Interview, 1, 2, 3 4). Menurut pendapat dari organisasi WRI Indonesia tantangan ini akan di jelaskan sebagai berikut.

## Tantangan Kebijakan dan Program NPAP-GPAP

Kebijakan dan program NPAP belum menyentuh masyarakat banyak, hanya sebagian kecil masyarakat yang mendapat pengetahuan tentang NPAP dan mau bergerak mencapai target NPAP-GPAP (Interview, 1, 2, 3, 4). Adapun terkait salah satu sebab tidak terjangkaunya masyarakat luas mendapatkan informasi dan paham tentang kebijakan serta program NPAP adalah karena kesenjangan infrastruktur, khususnya dikawasan pedesaan yang minim sarana-prasarana informasi dan telekomunikasi. Pemerintah daerah juga tidak diberikan sanksi oleh pemerintah pusat ketika gagal menjalankan kolaborasi NPAP ditingkat daerah (Interview, 1, 2). Selain itu, belum ada standar mekanisme sanksi dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat terhadap pihak swasta atau masyarakat sipil terkait implementasi kebijakan dan program NPAP.

Sehingga salah satu penyebab adanya tantangan kebijakan dan program dalam NPAP sampai saat ini menurut WRI Indonesia adalah karena masih minimnya aksi nyata lapangan secara langsung dan NPAP pun baru menyelesaikan 3 peta jalan (*roadmap*) dari 5 peta jualan yang ada (Interview, 1). Dari hasil interview perwakilan WRI Indonesia ini juga ditemukan bahwa bahwa NPAP meluncurkan lima gugusan tugas yang disebut dengan *task force*, dan akan dijelaskan berikut ini:

1. *Task Force* kebijakan
2. *Task Force* Inovasi (penelitian, teknologi/pengembangan, model bisnis, pasar), pemerintah seperti dari Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), melakukan kerjasama bersama perusahaan yang memproduksi plastik misalnya Perusahaan Daud Plastik, Komik Pelestarian Lingkungan, PT Chandra Asri, bersama dengan fencer-fencer zero sampah plastik, dan juga Start-Up untuk berdiskusi membuat peta jalan yaitu *unlocking inovasi*.
3. *Task Force* investasi dan keuangan berkelanjutan (*financing*) memiliki tugas sebagai pembiayaan untuk kemungkinan rintangan. Di dalam member *financing* terdapat *all usual plastic west*, *sirkuit kapital* (lingkaran pokok), dan *International Development Bank* (IDB), *asean double found bank*, dari Kedutaan Canada, Kedutaan Inggris, Financial Bank, dan Investor Bank yang memiliki tugas sebagai *unlooking financial*. Sehingga dari *finding-finding* yang sudah ada akan mendukung dan memudahkan untuk mendapatkan *financing*. Juga bertugas sebagai peningkatan *fencer* (pemain anggar) untuk mendukung dan menyeimbangkan antara member inovasi dan *financing* akhirnya bisa melakukan kolaborasi. Sehingga dari *financing* bisa melakukan diskusi secara bersama dan memberikan mekanisme solusi *financing* terhadap kemungkinan terdapat rintangan pembiayaan.
4. *Task Force* kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku, merupakan wadah yang dibuat untuk merubah perilaku dari level individu, industri, dan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan sampah plastik di perairan Indonesia (Interview, 1). Melalui kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku, akan membentuk *Extended Producer Responsibility* (EPR). EPR merupakan sebuah tanggung jawab dari produser yang melakukan memproduksi terhadap barang-barang dan jasa dengan *packaging* yang memiliki tanggung jawab atas limbah dan produk yang telah diproduksi (Interview, 1). Misalnya, Danone dan Unilever sudah mulai memiliki *global minded* untuk menghasilkan *packaging plastik netral* atau karbon netral pada Tahun 2025

(Interview, 1; Agustina, 2019). Untuk perubahan perilaku, NPAP juga melakukan wawancara kepada Danone, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan pemerintah misalnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan terkait dengan perubahan perilaku terhadap para pelajar.

5. *Task Force* metriks (transparansi dan akuntabilitas) memiliki tugas sebagai *harmonizing best line*. Pada *task force* metriks NPAP mengangkat 3 hal dalam pelaksanaan pengurangan sampah plastik yaitu pemulung, gender yaitu perempuan dan *youth voice*.

### **Tantangan Dukungan Publik**

Setiap implementasi dari program yang dibuat oleh organisasi tentunya mengharapkan dukungan publik agar tetap bisa melaksanakan program-program tersebut. Meskipun ada terdapat dukungan dari berbagai pihak baik itu pemerintah, pengusaha dan organisasi masyarakat sipil lain. Tidak menutup kemungkinan ada saja yang akan menjadi tantangan dari dukungan publik terhadap isu pengurangan sampah plastik mencapai 70% tahun 2025 oleh NPAP (WRI, 2020).

Menurut WRI Indonesia untuk implementasi pengurangan sampah yang dilakukan oleh NPAP masih terdapat tantangan dukungan publik, meski demikian ada beberapa kunci kesuksesan lain yang penting juga untuk diperhatikan menurut WRI yang disampaikan narasumbernya, diantaranya terkait dengan peran pemulung, gender (perempuan) dan *youth* (para generasi muda).

Saat ini NPAP baru mengeluarkan *road map* atau peta jalan, selanjutnya NPAP sedang melakukan diskusi untuk membuat indikator-indikator dari *task force* metriks yang mengangkat 3 hal dalam pelaksanaan pengurangan sampah plastik di Indonesia. Pertama melalui pemulung, karena merupakan aktor utama yang paling mampu melakukan pengelolaan sampah dan memilah sampah yang masih bisa digunakan dan masih memiliki nilai, sehingga sampah tersebut dibawa ke bank sampah dan di kelola dengan baik. Melalui pengumpulan sampah oleh pemulung yang memiliki peran yang sangat besar terhadap pengurangan tumpukan sampah di TPA dan aliran sungai (Interview, 1).

Berdasarkan laporan Bank Dunia yang memperkirakan 15 juta orang tersebar di seluruh dunia hidup dari sampah yang dapat digunakan kembali (Medina, 2009). Sedangkan jumlah pemulung di TPA dari 116 kota/kabupaten pada tahun 2006 dengan jumlah sebesar 14.538 orang pemulung. Dari besar pemulung ini berpotensi terhadap ekonomi dan lingkungan yang lebih baik serta untuk mengurangi sampah di Indonesia ("Statistik Persampahan Indonesia," 2008).

Dari data ini, dilihat bahwa pemulung merupakan potensi untuk strategi pengelolaan sampah yang ditimbun ke TPA. Pemulung juga memiliki peranan yang sangat penting untuk mengurangi jumlah sampah baik itu sampah sebelum dan sesudah sampai ke TPA. Meskipun bisa dikatakan bahwa pemulung memiliki peranan yang besar dalam mengurangi sampah di Indonesia, tapi kenyataannya tangan pemerintah masih belum sampai kepada pemulung dalam memberikan wadah yang luas.

Kedua, ada peran gender khususnya perempuan, karena peran perempuan juga sama besar dengan pemulung yaitu mampu mengkonsumsi plastik setiap hari dengan jumlah yang besar. Misalnya perlengkapan dapur cenderung menggunakan

plastik, peralatan *make up*, dan aktivitas lain yang menggunakan plastik (Interview, 1). Tentu limbah dari hasil konsumsi yang dilakukan oleh perempuan ini akan berakhir menjadi sampah. Ketika para perempuan bijak dalam mengelola limbah sampah secara mandiri tanpa harus membuang ke tempat pembuangan sampah, hal ini akan lebih baik dan dapat mengurangi beban permasalahan sampah di Indonesia.

Ketiga, perlu adanya pengembangan suara generasi muda, adanya *youth voice* diharapkan berperan penting dalam mendiseminasikan mensosialisasikan isi atau substansi dari dokumen-dokumen yang ada pada NPAP, misalnya seperti inisiatif yang dibuat oleh Switania, dan kawan-kawan melalui *Youth NGO* bernama *Diver Clean Action* dan juga inisiatif organisasi berbasis komunitas seperti *Think Policy Society* yang *co-founder* nya adalah Andhyta Firselly Utami (Interview, 1). *Youth voice* atau suara generasi muda ini diharapkan dapat memberikan dampak sosial yang positif terhadap perubahan perilaku, program dan juga kebijakan, khususnya dalam penanganan sampah plastik di Indonesia.

#### 4.2.1.4 Tantangan Pendanaan

Untuk menjalankan program dari NPAP yaitu mengurangi sampah plastik di perairan Indonesia hingga 70% memiliki tantangan yang cukup besar termasuk juga tantangan pendanaan. Karena setiap pelaksanaan program tidak ada yang tidak membutuhkan biaya, apalagi untuk melakukan pengolahan terhadap sampah organik dan un-organik. Berdasarkan dari aksi penanganan sampah yang dilakukan dalam kolaborasi NPAP ini, nara sumber dari WRI Indonesia menyampaikan bahwa NPAP yang memiliki lima gugusan tugas (*task force*) yang tentunya aksi-aksi dari *taskforce* ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit (Interview,1). Melalui lima gugusan tugas terdapat salah satunya dari *task force financing* yang kemudian akan bekerjasama dengan kementerian keuangan dari NPAP. Kerjasama ini dilakukan dalam bidang badan kebijakan fiskal bersama dengan *International Development Bank (IDB)*, *Asean Double Found Bank*, *Financial Bank*, dan *Investor Bank* serta member-member dari Kedutaan Canada, Kedutaan Inggris, yang memiliki tugas sebagai *unlocking financial* (Interview, 1).

Dari hasil wawancara melalui narasumber di atas dapat diketahui bahwa untuk melakukan dan mengimplementasikan setiap program organisasi pada isu sampah plastik bukanlah hal yang mudah. Setiap kegiatan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Meskipun kegiatan hanya sebatas seminar untuk mengedukasi dan memberikan pengetahuan tentang bahaya penggunaan plastik yang tidak dikelola dengan benar juga tetap memerlukan biaya. Untuk mengumpulkan biaya, NPAP sebagai platform *multi-aktor* berusaha mengumpulkan sumber pendanaan yang nantinya akan membantu dalam pembiayaan NPAP (Interview, 1).

Untuk pembiayaan dari NPAP juga didapat melalui WRI Indonesia melalui proposal pengajuan terhadap pengurangan sampah plastik di perairan Indonesia hingga 70% tahun 2025 (Interview, 1). WRI Indonesia juga merekomendasikan pemberian dana untuk penelitian sampah yang ada di perairan. WRI Indonesia juga akan memastikan setiap kebijakan dan regulasi tentang penanganan sampah plastik bisa di pantau dan dilakukan dengan benar berdasarkan dari hasil penelitian terhadap sampah yang ada di perairan Indonesia (Kirana & Purba, 2021).

WRI Indonesia berupaya mewujudkan laut yang sehat dan produktif dengan melestarikan ekosistem laut, serta meningkatkan produktivitas perikanan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Sedangkan NPAP untuk menyukseskan programnya masih minim anggaran sehingga memerlukan kerjasama dan kolaborasi bersama dengan finding lain. Misalnya NPAP meluncurkan rencana aksi *multi pihak* dalam menangani limbah sampah plastik di perairan untuk terlibat secara aktif (WRI Indonesia, 2020).

### **Get Plastic Foundation**

Pada awalnya untuk mengoperasikan mesin menjadi bahan bakar mempunyai kesulitan, karena kualitas minyak yang dihasilkan belum cukup baik. tapi pada uji coba ke tujuh, mesin tersebut menghasilkan apa yang diharapkan. Untuk menyempurnakan mesin pengolahan sampah yang disebut sebagai GP07 membutuhkan waktu tiga sampai empat tahun. Melalui uji laboratorium bahan bakar yang dihasilkan mempunyai nilai *cetane* yang terkandung lebih tinggi dari *Pertmina Dex* (KEHATI, 2019).

Minyak yang dihasilkan dari pengolahan mesin GP07 kemudian menjadi sumber energi alternatif selain fosil. Karena satu kilogram sampah plastik akan menghasilkan satu liter bahan bakar minyak mentah. Minyak tersebut terdapat kandungan *oktan* RON 84 yang dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, mesin diesel dan kompor minyak terutama yang paling bagus digunakan untuk mesin diesel (KEHATI, 2019).

Pada prinsipnya semua jenis plastik dapat diolah menjadi gas atau minyak mentah, tapi untuk plastik jenis PET (*Polyethylene Terephthalate*) terbilang paling kecil karena mempunyai kandungan minyak yang sangat sedikit hanya 20 persen. Gerakan ini tidak melakukan pengolahan pada plastik jenis PET (*Polyethylene Terephthalate*) karena biaya produksi cukup tinggi. Ada empat jenis plastik yang diolah untuk menghasilkan minyak mentah misalnya seperti *High Density Polyethylene* (HDPE), *Polypropylene* (PP), *Low Density Polyethylene* (LDPE), dan *Polystyrene* (PS). Dari jenis plastik ini akan menghasilkan satu kilogram sampah plastik menghasilkan satu liter minyak mentah, sedangkan untuk satu kilogram PET (*Polyethylene Terephthalate*) hanya menghasilkan 200 mililiter (Asmail, 2018).

Gerakan ini tidak menyalahkan adanya pengolahan sampah menjadi berbagai kerajinan seperti dompet, tas, meja dan kursi. Karena pada dasarnya setiap kerajinan itu memiliki batas waktu, pada akhirnya akan menjadi sampah kembali. Ada perbedaan cara menangani sampah plastik yaitu diolah menjadi bahan bakar melalui mesin, pengolahan ini tidak akan menyisakan limbah di lingkungan. Selain bahan bakar tersebut dapat digunakan oleh masyarakat, limbah dari hasil pengolahan sampah plastik ini juga masih menyisakan *residu* seperti arang tetapi gerakan ini memanfaatkannya sebagai material untuk melukis.

Pada tahun 2017 gerakan sosial ini baru diresmikan secara hukum dengan nama *Get Plastic Foundation*, sesuai dengan akta pendirian dengan Notaris Herdardjo, S.H. kemudian pada tahun 2018 Get plastic sudah disahkan dalam keputusan menteri hukum dan HAM RI No. AHU-0000797.AH.01.07 Tahun 2018 tentang pendirian badan hukum perkumpulan Gerakan Tarik Plastik. Tujuan dari Get Plastic adalah untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat melalui teknologi sederhana "*plastic to fuel*" yang mengolah sampah plastik menjadi BBM (Getplastic,

2020). Get plastic memiliki harapan untuk pengurangan tumpukan sampah plastik dengan tindakan masyarakat yang bijak memilah dan menjadikannya memiliki nilai.

Get Plastic merumuskan kerangka kerja untuk menangani dampak sampah plastik di buat dalam kurun waktu tiga tahun mulai dari tahun 2018-2020. Dasar pemikiran yang dipakai adalah program Pemerintah Indonesia untuk bebas sampah plastik pada 2020. Kemudian Get Plastic juga mengharapkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengolah sampah plastik menjadi energi. Korelasi juga dilakukan oleh get plastic kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah, CSO, CSR, masyarakat, dan swasta agar dapat melakukan pengelolaan sampah plastik (Getplastic, 2020).

Mesin pengolahan sampah plastik pada awalnya dibuat dengan menggunakan bahan-bahan bekas yang didapat dari lingkungan sekitar dan juga dapat dibeli dari pasar lokal. Get plastic lebih mengedepankan konsep *low-technology*, dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Namun, demi cakupan yang lebih luas, get plastic mulai melakukan pengembangan alat dari bahan *stainless steel* untuk dapat memaksimalkan hasil dan ketahanan dari teknologi mesin itu. Komponen alat terdiri dari *reaktor*, *kondensor*, tabung penyimpanan minyak dan penyaring gas dengan teknik *hidrokarbon* (Getplastic, 2020).

Tantangan-tantangan ini berupa tantangan tata kelola organisasi, kebijakan dan program NPAP-GPAP dukungan publik dan pendanaan yang akan dijelaskan berikut:

### **Tantangan Tata Kelola Yang Baik (*good governance*)**

Berdasarkan hasil interview dengan *Get Plastic Foundation*(Interview, 2) menunjukkan adanya tantangan tata kelola dalam menjalankan program-program pengurangan sampah plastik di Indonesia. NPAP merupakan inisiasi yang cukup paham terhadap isu sampah plastik di Indonesia. NPAP juga mengarah pada kebijakan pemerintah yang mempunyai *goals* besar untuk mengurangi sampah plastik hingga 70% pada Tahun 2025 (Interview, 2; WRI, 2020). Indikator NPAP untuk mengurangi sampah plastik hingga 70% cukup jelas, tapi untuk implementasinya masih parsial dan kemudian untuk program aski bersama juga tidak ada (Interview, 2). Kolaborasi juga pada dasarnya baru sekedar mengikuti seminar dan pertemuan-pertemuan besar yang di usung pemerintah seperti, Bapenas dan PPN (Interview, 2). Sedangkan untuk mencapai target pengurangan sampah plastik harus ada aksi nyata yang dilakukan bersama dengan *multi*-aktor yang sudah dihimpun dalam kolaborasi yang dilakukan oleh NPAP.

Hal ini dilakukan untuk mencapai target pengurangan sampah plastik hingga 70% dapat lebih terukur (WRI, 2020). Inisiatif yang dilakukan oleh NPAP memang sudah bagus karena memiliki target yang sama dengan pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum konsisten untuk menghimpun semua inisiatif-inisiatif penyelesaian sampah plastik yang ada di Indonesia. Termasuk untuk melakukan aksi nyata bersama dengan Get Plastic (Interview, 2).

Dari tantangan kolaborasi di atas dijelaskan bahwa, untuk melakukan kolaborasi kerjasama bukanlah satu hal yang mudah. Apalagi tindakan untuk inisiatif pengurangan sampah plastik di Indonesia, semua pemangku kepentingan baik itu pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat sipil memiliki kepentingan masing-

masing (Interview, 2). Memang sudah banyak bermunculan inisiatif penggiat lingkungan khususnya isu sampah plastik, tetapi untuk mencapai 70% pengurangan sampah plastik masih sangat jauh.

### **Tantangan Kebijakan dan Program NPAP-GPAP**

Berdasarkan hasil interview dengan Get Plastic Foundation juga menunjukkan adanya tantangan kebijakan dan program NPAP-GPAP dalam menjalankan setiap program khususnya pengurangan sampah plastik di Indonesia.

Permasalahan sampah plastik khususnya di perairan sangat mengganggu dan merusak lingkungan. Get plastik sendiri melihat permasalahan ini mulai dari hulu sampai ke hilir, yaitu dengan sampah individu, rumah tangga dan kemudian sampah tersebut berpindah tangan ke tangan petugas pada akhirnya sampah tersebut akan berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) (Interview, 2). Sedangkan TPA yang ada di Indonesia masih minim melakukan pengolahan sampah. TPA di Indonesia sebagian besar hanya melakukan pengumpulan dan kemudian dilakukan penimbunan. Menurut interview bersama Get plastic bahwa, paradigma penanganan sampah dilakukan dengan cara kumpul angkut buang tidak ada pemilahan dan pengolahan dan bahkan akan ditumpuk seperti itu saja (Interview, 2).

Berdasarkan dari pernyataan di atas bahwa data dari KLHK menunjukkan sampah yang dihasilkan dari sisa makanan dan tumbuhan sebesar 50%, plastik 15%, kertas 10% sedangkan sisanya terdapat pada sampah logam, karet, kain dan kaca. Sedangkan sumber sampah yang paling dominan berasal dari rumah tangga yaitu 48%, pasar tradisional 24% dan kawasan komersial 9% sisanya dari berbagai fasilitas publik, sekolah, kantor, dan jalan (Bahriyatul, 2019).

Melalui mesin pengolahan sampah, Get Plastic membuat program komunitas untuk dapat menyelesaikan sampah pada tingkat komunitas. Get plastik sendiri sudah memiliki 20 mitra dampingan, misalnya seperti mengolah sampah berbasis desa, setiap rumah akan mengumpulkan dan memilah sampah organik dan unorganik. Kemudian sampah tersebut akan diolah menjadi bahan bakar solar dan bahan bakar tersebut juga dapat digunakan oleh masyarakat komunitas untuk kebutuhan rumah tangga (Interview, 2).

### **Tantangan Dukungan Publik**

Hasil *interview* dengan *Get Plastic Foundation* juga menunjukkan adanya tantangan dukungan publik dalam menjalankan program pengurangan sampah plastik di Indonesia (Interview, 2). *Get plastic* menyadari bahwa rendahnya kepedulian masyarakat menunjukkan rendahnya dukungan publik terhadap isu sampah secara umum, apalagi sampah plastik di perairan. Kepedulian *Get plastic* bercita-cita untuk mereplikasikan sebanyak mungkin mitra-mitra yang berhasil mengolah sampah pada sumbernya (interview, 2). Get plastik bermitra dengan 20 inisiatif untuk mengurangi sampah plastik seperti pemerintah dan organisasi masyarakat. Get plastic juga menancapkan bendera pada peta wilayah dengan masalah sampah plastik yang besar. Dengan cara seperti ini maka setiap permasalahan sampah plastik diharapkan bisa membuka mata pemerintah, misalnya untuk membuat TPA pada sumber masalah itu sendiri.

Gap nya adalah penanganan sampah di tingkat pemerintah khususnya memfasilitasi TPA. Melalui gap tersebut, Get plastik melihat juga peluang yang ada di komunitas dengan cara melakukan riset bersama dengan komunitas. Untuk

mengolah dan mengoperasikan mesin get plastic, juga bisa dilakukan dengan cara pelatihan dengan waktu yang singkat yaitu lima hari. Tidak harus membayangkan mesin dengan teknologi yang tinggi harus di gunakan oleh orang-orang dengan *skill* dan kemampuan yang tinggi bisa menggunakan mesin tersebut (Interview, 2).

### **Tantangan Pendanaan**

Hasil interview ini juga menunjukkan adanya tantangan pendanaan dalam menjalankan program pengurangan sampah plastik di perairan Indonesia (Interview, 2). Dalam perjalanan Get Plastik, untuk menangani sampah plastik secara luas harus melakukan kolaborasi dan bersinergi dengan pemangku kepentingan dari *funding-funding* besar, NGO lain dan pemerintah, maupun swasta. Namun, untuk melakukan koordinasi secara inten bersama dengan para pemangku kepentingan tidak mudah dan merupakan satu tantangan yang besar bagi setiap organisasi masyarakat khususnya get plastic (Interview, 2). Oleh karena para pemangku kepentingan memiliki karakter yang berbeda, juga memiliki kepentingan dan ego sektoral berbeda, (Interview, 2).

Get Plastik yang melakukan riset mesin pengolahan sampah plastik justru mendanai setiap gerakan program secara mandiri. Get plastic juga melakukan kerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah, tetapi hanya sebatas lingkup kemitraan. Bisa di bilang bahwa Get Plastik merupakan sosial *enterpreneur* yaitu secara mandiri mendanai setiap gerakan dan program yang dilakukan oleh Get Plastik. Get plastik tidak mendapatkan dana dari pemerintah maupun *funding* besar dari donator lain. Get Plastik mempunyai tujuan utama yaitu menyelesaikan permasalahan sampah plastik dan bukan hanya untuk mengangkat isu semata (Interview, 2).

Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa untuk mengumpulkan dana, get plastik bermodalkan dengan kemampuan membuat alat pengolahan sampah plastik. Kemudian *founder-founder* dari get plastic juga melakukan penggalangan dana melalui kitabisa.com dan melalui Bank BRI atas nama Yayasan Get Plastik Indonesia. Dari pengumpulan dana ini kemudian terkumpul sejumlah uang yang digunakan untuk membuat alat pengolahan sampah plastik, genset, perlengkapan instalasi listrik, penelitian, kampanye dan workshop, dan membantu biaya operasional lain (Getplastic, 2020).

### **SRIFoundation Indonesia**

SRI foundation merupakan wadah berbagi pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup. SRI foundation lebih fokus kepada meningkatkan kesadaran masyarakat awam tentang isu sampah plastik yang menjadi ancaman bumi, serta mengkampanyekan pentingnya peran serta masyarakat alam menjaga *sustainable wellbeing* pada lingkungan. SRI foundation juga menyediakan layanan seperti sedekah sampah, *workshop online* untuk para peajar, kampanye pendidikan lingkungan hidup dan *mind your waste* (Foundation, 2021).

Untuk mengetahui sejarah pembentukan SRI foundation maka akan di jelaskan melalui interview dengan SRI Foundation (3). Sri Foundation di mulai di awal Tahun 2021, merupakan Yayasan Sekolah Rakyat Indonesia. Yayasan Sekolah Rakyat Indonesia yang baru didirikan ini adalah untuk divisi lingkungan hidup. Kontribusi SRI foundation terhadap penanggulangan sampah plastik baru

hanya sekedar kampanye. Para pelajar SMA menjadi fokus SRI Foundation dalam menyampaikan edukasi terkait penanganan sampah, karena para pelajar ini merupakan aset generasi yang akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia di masa depan (Interview, 3).

SRI Foundation memberikan edukasi kepada siswa SMA terhadap darurat sampah plastik di Indonesia, termasuk memberitahukan penelitian yang dilakukan oleh Jenna Jambeck. Bahwa Indonesia merupakan negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia terutama di *Green Pacific Global*. Di Samudra Pasifik, ada sebuah pulau yang isinya dipenuhi dengan sampah-sampah terutama sampah plastik (Interview, 3). Target SRI foundation juga sama dengan masyarakat sipil lainnya yaitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa sampah plastik yang dibiarkan akan menjadi permasalahan pada lingkungan (Interview, 3).

Dari penjelasan di atas sesuai dengan keadaan Samudra Pasifik saat ini yang dipenuhi dengan sampah khususnya plastik. Kumpulan sampah yang ditemukan di Samudra Pasifik ini dikenal dengan *The Great Pacific Garbage Patch*. *The Great Pacific Garbage Patch* kemudian dikenal sebagai sebuah pusaran sampah Pasifik, membentang dari pantai barat Amerika Utara hingga Jepang. Pusaran sampah kedua wilayah yang bertemu di Pasifik ini karena dipengaruhi oleh zona konvergensi subtropis pasifik utara, terletak beberapa ratus kilometer di utara Hawaii (Suwanrumpha, 2021).

Jumlah puing-puing sampah yang ada di *Great Pacific Garbage Patch* terakumulasi karena sebagian besar sampah tersebut tidak dapat terurai. Misalnya sampah plastik hanya bisa menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. *Great Pacific Garbage Patch* disebut juga oleh sebagian orang sebagai pulau sampah yang mengambang di perairan. Sesuai dengan namanya, hampir seluruh kawasan di pasifik terdiri dari potongan-potongan partikel plastik (*mikroplastik*). Ahli kelautan dan ekologi baru-baru ini menemukan bahwa 70 persen sampah yang ada di perairan tenggelam ke dasar laut (Suwanrumpha, 2021).

*Great Pacific Garbage Patch* berada sangat jauh ditengah lautan dan hampir tidak pernah didatangi oleh manusia. Para ilmuwan jarang melihat langsung dampak tumpukan sampah pada hewan, tapi diyakini bahwa sampah bisa berdampak pada satwa liar, sampah juga akan terjebak pada jaring nelayan dan bahkan bisa membungkus hewan. Sampah laut juga dapat mengakibatkan berpindahnya spesies dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya, Alga, Teritip, dan Kepiting yang akan diangkut oleh sampah melintasi lautan hal ini juga dapat mengganggu ekosistem. Bukan hanya hewan, sampah plastik juga bisa berdampak pada manusia dengan cara terpapar *mikroplastik* yang ada pada sumber makanan misalnya, makanan laut dan garam laut (Suwanrumpha, 2021).

Pada dasarnya, yang dilakukan setiap orang di darat misalnya membuang sampah sembarangan akan jatuh di got, di bawa oleh angin di aliran air, sungai-sungai kecil dan berujung sampai ke perairan. Aktivitas yang dilakukan di kota ternyata sampai ke lintas kabupaten Kota, Provinsi, Negara dan bahkan lintas batas sehingga berkumpul di Samudra Pasifik. SRI foundation melakukan edukasi tidak hanya kepada para pelajar tapi juga kepada masyarakat umum untuk lebih mengetahui kebenaran tentang bahaya sampah yang tidak di kelola dengan baik (Interview, 3).

Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan masih belum mengetahui bahwa membuang sampah pada tempatnya memang sudah benar, tetapi tidak akan pernah tahu bahwa sampah tersebut akan berakhir di TPA. Setelah sampah sampai ke TPA tidak di ketahui oleh kebanyakan masyarakat

terhadap dampaknya. Sri Foundation juga membuat webinar tentang bagaimana cara mengatasi sampah dari rumah terutama sampah plastik, membuat *workshop* untuk pembuatan bank sampah (Interview, 3).

Tantangan-tantangan ini berupa tantangan tata kelola yang baik, kebijakan dan program NPAP-GPAP dukungan Publik dan pendanaan.

### **Tantangan Tata Kelola Yang Baik (*good governance*)**

Berdasarkan hasil interview dengan SRI Foundation menunjukkan adanya tantangan *good governance* (tata kelola yang baik) (Interview, 3). Untuk tantangan tata kelola organisasi SRI Foundation melihat dari dua sisi mekanisme yaitu mekanisme hilir dan hulu. Dari sisi hulu misalnya dari perusahaan harus lebih *aware* dan mendukung misalnya mulai membuat kemasan yang mudah untuk di *recycle*. Kebenarannya ada beberapa perusahaan melakukan hal ini dengan keinginan mereka sendiri. Sedangkan dari pemerintah belum ada dorongan (*push*) untuk memaksa pihak swasta-bisnis melakukan hal yang sama (Interview, 3).

Para pemulung yang ada di Indonesia juga hanya memungut sampah yang diterima oleh bank sampah saja, kemudian sampah dari produk yang sulit sekali untuk di kelola akan tetap menjadi timbunan di TPA, lingkungan dan perairan. Tantangan lain terhadap plastik adalah akan lebih baik untuk mendapatkan bahan lain pengganti plastik yang bisa lebih ramah dan bisa lebih mudah terurai, misalnya dari bahan singkong tapi saat ini plastik memang sangat dibutuhkan, misalnya untuk barang-barang kesehatan seperti botol infus dan lain-lain. Untuk lebih baik bergerak secara pelan untuk memulai mencari pengganti bahan plastik (Interview, 3). Kemudian baru akan tercapai target pengurangan sampah plastik di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dari sebagian besar penggiat lingkungan dan media. Bahwa, sampah plastik akan terus meningkat dan berdampak buruk terhadap manusia dan hewan yang ada di perairan jika tidak ditangani dengan baik dan benar. Peningkatan jumlah sampah plastik ini tentu berkaitan dengan jumlah kemasan *sachet* yang meningkat dipasaran. Bagi sebagian masyarakat, mengkonsumsi kemasan *sachet* adalah hal yang membantu meringankan biaya hidup tapi pada kenyataannya masyarakat tidak mengetahui kemana akhir dari bungkus-bungkus *sachet* kemasan ini. Misalnya yang paling banyak digunakan adalah produk deterjen, sampo, ciki-ciki dan termasuk juga sampah popok serta pembalut.

#### **4.2.3.2 Tantangan Kebijakan dan program NPAP-GPAP**

Interview yang dilakukan dengan SRI Foundation juga menjelaskan adanya tantangan kebijakan dan program NPAP-GPAP. Ketika membahas tentang *environment* ada yang namanya *environment bank* atau biasa disebut dengan pajak lingkungan. pada saat pihak perusahaan ada yang membayar pajak lingkungan kepada negara, maka semua akan dimasukkan kedalam satu tempat. Kemudian seluruh pajak yang dikumpulkan negara akan dijadikan satu. Baru kemudian nantinya pemerintah mendistribusikan dana kepada pemerintah daerah. Sedangkan untuk pajak lingkungan diaplikasikan untuk retribusi pajak, itu kurang efektif dan kurang pas (Interview, 3).

Kemudian tantangan ini juga dijelaskan tentang bagaimana aturan tentang perpajakan ini bisa didistribusikan berdasarkan dari mana pajak itu berasal misalnya pajak lingkungan akan kembali kepada dukungan pengelolaan dan

pengurangan sampah di Indonesia. Pajak lingkungan tersebut di bagi-bagi dan bukan hanya *one in one out* misalnya pajak untuk lingkungan di distribusikan untuk lingkungan dan hal ini tidak terjadi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia (Interview, 3).

Dari penjelasan diatas bisa dilihat bahwa, dukungan pemerintah terkait dengan penanganan lingkungan di Indonesia masih belum efektif khususnya isu sampah plastik. Dari pihak perusahaan dan swasta juga sangat masih sedikit yang benar-benar ikut berpartisipasi dalam mengurangi sampah plastik. Bahkan kebanyakan dari pihak usaha berlomba-lomba untuk memproduksi kemasan *sachet*. Kemasan *sachet* ini kebanyakan *multilayer* dan sulit untuk di daur ulang, sedangkan konsumen merasa terbantu dengan adanya produk *sachet* ini, tapi pada kenyataannya ini merupakan permasalahan yang harus diselesaikan.

#### 4.2.3.3 Tantangan Dukungan Publik

Ada beberapa tantangan dukungan publik berdasarkan hasil interview dengan SRI Foundation.

Pertama, dalam program NPAP tentang memiliki rencana untuk meningkatkan cakupan layanan untuk penanganan sampah plastik melalui program yang di buat oleh NPAP. Untuk cakupan layanan diperkotaan baru mencapai 70%, misalnya kalau didesa dan daerah terpencil (*remote area*) itu akan lebih rendah lagi. Kemudian seharusnya di perkotaan harus sudah 100%, karena penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan sebesar 50% dari penduduk dunia (Interview, 3).

Kedua, edukasi yang dilakukan belum menjangkau masyarakat luas, terutama dari wilayah terpencil dan pedesaan, sehingga untuk pengetahuan bahaya sampah masih belum diketahui oleh masyarakat. Ini yang menyebabkan orang yang tinggal di desa sekalipun, dengan bangga menggunakan popok sekali pakai, mengkonsumsi produk *sachet*, dan sudah menjadi kebiasaan (Interview, 3).

Pada aliran sungai di Pulau Jawa di Mitos Sulutan banyak terdapat sampah popok, sehingga aliran sungai ini menjadi terhambat. Dari LSM *ecological observation and wetlands conservation (Ecoton)*, menjelaskan bahwa sampah popok juga menjadi persoalan sungai-sungai di Pulau Jawa. Sampah popok juga ditemukan di sungai besar seperti Kali Brantas, Bengawan Solo, Citarum, dan Progo. Di sungai Brantas, Ecoton memperkirakan ada sampah popok sekali pakai sebanyak 3 juta yang dibuang warga ke kali setiap hari (Indriyani, 2019).

Bahan dari popok sekali pakai terdapat 55 persen material plastik didalamnya, 42 persen senyawa kimia *Super Absorbent Polimer (SAP)* yang membuat daya serap popok cepat terjadi karena berubah menjadi *gel* saat terkena air. Senyawa ini jika dimakan oleh hewan yang ada di perairan maka akan dapat menyebabkan perubahan hormon pada ikan (Indriyani, 2019).

#### Tantangan Pendanaan

Adanya tantangan pendanaan berdasarkan hasil interview dengan SRI foundation yang menjelaskan bahwa tantangan pembiayaan dari organisasi Sri Foundation sendiri untuk saat ini masih sebatas edukasi virtual yang dilakukan secara *online*. Sehingga belum membutuhkan biaya yang besar, yang menjadi salah satu penyebab SRI Foundation belum ada aksi nyata secara langsung adalah karena kondisi covid-19 yang masih menyerang Indonesia. Namun, untuk setiap kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh SRI Foundation adalah dengan cara

mengumpulkan dana dari setiap anggota dan partisipan dari Sri Foundation (Interview, 3).

Dari keterangan hasil wawancara di atas bisa lihat bahwa, SRI Foundation belum banyak melakukan aksi nyata untuk mengurangi sampah yang ada di Indonesia. Meski kegiatan baru hanya dilakukan dengan virtual *online* untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan para siswa SMA, tapi tetap saja membutuhkan biaya operasional. SRI Foundation juga masih minim anggaran untuk menyukkseskan program pengurangan sampah karena organisasi ini masih bergerak sendiri-sendiri, tidak terorganisir dan tidak ada bantuan pendanaan yang khusus dari pemangku kepentingan misalnya pemerintah maupun pihak swasta-bisnis. Untuk itu SRI Foundation juga membuka bagi siapa saja yang ingin memberikan donasi untuk mendukung aksi pengurangan sampah di Indonesia melalui Rekening Bank Syariah Indonesia atas nama SRI Foundation.

### **Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdatul Ulama (LPBINU)**

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdatul Ulama (LPBINU) merupakan aksi penanggulangan bencana dalam situasi darurat, aksi ini akan memberikan bantuan kemanusiaan dan logistik terhadap korban. Dalam pedoman tanggap darurat bencana ini disusun oleh BNPB tahun 2009. Tanggap darurat bencana merupakan rangkaian kegiatan untuk menangani dampak buruk bencana yang ditimbulkan. Keegiatannya meliputi penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, bantuan logistik, pengurusan dan perlindungan pengungsi, penyelamat serta pemulihan sarana dan prasarana (Rozali, 2018).

Salah satu persoalan penyebab terjadinya kerusakan lingkungan dan adanya banjir yang terus-menerus terjadi di wilayah DKI Jakarta, salah satunya disebabkan oleh sampah yang ada di aliran air dan sungai. Data dari DKI Jakarta menunjukkan jumlah produksi sampah perhari mencapai 76 ribu ton. Untuk itu dari LPBI NU bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan kegiatan pengurangan sampah dengan membentuk Bank Sampah Nusantara (BSN) (Rukhin, 2018a).

Bank Sampah Nusantara (BSN) berdiri pada Tahun 2016, gerakan ini sesuai dengan instruksi Gubernur No. 157 Tahun 2016 bahwa setiap RW di Jakarta di himbau untuk memiliki bank sampah. Pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah plastik melalui BSN melalui pendekatan komunitas, masjid dan pondok pesantren. Kegiatan ini juga akan memberikan manfaat kepada masyarakat, selain mengurangi sampah yang ada juga terdapat nilai ekonomi yang dihasilkan. Ada beberapa kegiatan pendukung lain misalnya pelatihan pengelolaan bank sampah melalui pengurus mesjid dan memberikan sosialisasi kepada anak-anak (Rukhin, 2018a).

Bank Sampah Nusantara (BSN) juga menggelar Ngaji Plastik yang diikuti dari berbagai pelajar misalnya TPA/TK dari lingkungan sekitar. Sasaran awal kegiatan ngaji plastik adalah anak-anak, karena merupakan investasi untuk masa depan bangsa khususnya dalam menjaga lingkungan yang jauh dari sampah plastik. Tujuan dari Ngaji Plastik ini memberikan ilmu tentang penanganan sampah plastik, di jadikan sebagai *follow up* dalam melakukan kampanye dan edukasi agar tidak menggunakan plastik secara berlebih seperti kantong plastik, sedotan plastik dan kemasan *sachet* lain. Seperta ngaji plastik akan diajarkan teknik pengolahan sampah plastik menjadi *ekobrik* (Rukhin, 2018b).

### **Tantangan Tata Kelola Yang Baik (*good governance*)**

Berdasarkan hasil interview dengan ketua LPBI NU (4). Menunjukkan adanya tantangan tata kelola organisasi. Permasalahan sampah plastik cukup kompleks, oleh sebab itu yang bertanggung jawab dalam penanganan sampah tidak terbatas hanya pada pemerintah tapi juga dari berbagai sektor yang berkaitan dengan produksi, konsumsi dan kebijakan oleh pemerintah. Untuk melakukan kolaborasi sangat terbatas dan hanya bisa dilakukan dengan cara *virtual meeting*. Kolaborasi yang dilakukan misalnya kepada organisasi masyarakat sipil lain, pemerintah dan pengusaha. Untuk melakukan *meeting* bersama siswa didik itu sangat sulit di karenakan minat yang kurang, inilah yang merupakan tantangan tersendiri bagi LPBINU (Interview, 4).

Untuk tantangan ini memang cukup besar karena hal ini bisa dilihat dari masa pandemik saat ini, setiap program yang akan dilakukan akan terbatas dan dari kebanyakan kolaborasi melalui *virtual meeting*. Untuk mencapai tujuan pengurangan sampah plastik di Indonesia, tentunya mempunyai tantangan karena untuk melakukan aksi nyata masih terbatas. Yang menjadi permasalahan adalah hampir semua pemangku kepentingan bekerja dari rumah sehingga menghambat aktivitas kegiatan untuk mengurangi sampah di Indonesia. Hal bisa dilihat dari media-media LPBI NU yang melakukan kolaborasi bersama pemerintah misalnya KLHK dan Kementerian Agama, dengan pihak swasta misalnya Inaplas dari pembuat plastik, Coca-Cola Amatil Indonesia, dan organisasi masyarakat sipil seperti inisiator sedekah sampah, DKN mesjid dan bank sampah lain.

### **Tantangan Kebijakan dan program NPAP-GPAP**

Tantangan kebijakan dan program NPAP-GPAP berdasarkan hasil interview juga menjelaskan bahwa, Bank Sampah Nusantara membentuk program Ngaji Plastik, Ngaji Plastik merupakan metode pendidikan non-formal dari Nahdatul Ulama yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak usia dini. Peserta Ngaji Plastik akan diberikan edukasi tentang bahaya yang ditimbulkan oleh plastik dan bagaimana cara meminimalisir timbunan sampah plastik melalui pembatasan penggunaan plastik dan pengelolaan sampah plastik serta kebijakan pemerintah terkait sampah plastik nusantara (Interview, 4).

Ngaji Plastik akan di laksanakan di sepuluh titik di wilayah Jabodetabek, dengan peserta yang berasal dari Sekolah, Madrasah, Pesantren dan Majelis Taklim (Interview, 4). Selanjutnya, program yang di tawarkan oleh Bank Sampah Nusantara LPBINU yaitu menggandeng mesjid-mesjid sebagai sarana ibadah solat lima waktu, karena masih banyak paradigma demikian, karena dari NU menyadari bahwa ini merupakan tantangan yang harus ditangani oleh NU (Interview, 4).

Dan kemudian ada juga program yang dinamakan sebagai sedekah sampah di berbagai mesjid. Program sedekah sampah ini khususnya sampah un-organik, untuk pengumpulan sampah dilakukan pada saat melaksanakan Ibadah Solat Jumat. Pada saat solat jumat tersebut, para jamaah yang datang akan membawa dan menyedekahkan sampah un-organik. Selanjutnya bank sampah akan melakukan *Reus dan recycle* yang menurut LPBINU dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan sampah (Interview, 4).

Untuk program mengurangi sampah plastik saat ini, sudah banyak inisiatif-inisiatif pengolahan sampah yang muncul dan di luncurkan, termasuk juga aksi sedekah sampah. Karena pada kenyataannya, sampah-sampah yang menjadi sisa konsumsi ini selain memiliki nilai ekonomi juga mampu menjadi media untuk bersedekah. Melalui sekretaris Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Sampah

Laut (TKN PSL) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia meluncurkan Gerakan Sedekah Sampah Indonesia (GRADASI) dan buku panduan Khutbah Jumat yang berisi tentang tata kelola sampah menurut ajaran Islam (maritim.go.id, 2021).

Melalui peluncuran GRADASI juga dilakukan penyerahan tempat sampah dan buku Khutbah kepada Mesjid Az Zikra, Bogor Jawa Barat yang merupakan salah satu dari enam Mesjid yang diresmikan sebagai *pilot project program* GRADASI (maritim.go.id, 2021). Ini merupakan satu langkah inovasi yang cukup baik dalam mengurangi isu sampah di lingkungan. Mesjid tidak lagi hanya menjadi tempat Ibadah Solat Lima Waktu, tetapi juga dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan kesadaran penting masyarakat akan bahaya sampah plastik jika tidak dikelola dengan baik dan juga bisa beribadah melalui aktivitas sedekah sampah (Interview, 1, 2, 3).

### **Tantangan Dukungan Publik**

Hasil interview kepada LPBI NU juga menunjukkan adanya tantangan dukungan publik (Interview, 4). Tantangan dalam merubah *mindset* masyarakat khususnya jamaah terhadap permasalahan sampah ini tidak mudah, persoalan *mindset* terhadap sampah merupakan tantangan besar bagi setiap individu (Interview, 4). Tetapi ketika *mindset* itu di rubah baru kemudian menyadari bahwa apa yang dilakukan akan berdampak pada lingkungan. Untuk menyadarkan masyarakat terhadap sampah, karena tidak semua masyarakat bisa menerima apa yang disampaikan oleh sebab itu penggiat lingkungan, khususnya bank sampah nusantara memberikan edukasi yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan (Interview, 4).

Karena Sampai saat ini masih ada masyarakat yang berpikir untuk apa capek-capek mengolah sampah,hal ini hanya akan membuang waktu dan tenaga. Masyarakat masih banyak yang acuh terhadap sampah yang berserakan di lingkungan, karena masih ada yang berpikir bahwa ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah juga sudah mempunyai dinas kebersihan yang bertugas sebagai pengelola sampah, padahal bukan demikian. Tugas dinas kebersihan ini hanya sebagai pengumpul, lalu kemudian sampah tersebut diangkut dan di tumpuk di TPA (Interview, 4).

Hal ini berkaitan dengan himbauan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kepada warga Jakarta untuk bisa mengurangi, memilah dan mengolah sampah dari tingkat rumah tangga. Himbauan ini disampaikan pada peringatan puncak Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada desember 2020, di kawasan Cempaka Putih Jakarta. Menurut Anies, masyarakat perlu mengubah pola pikir tentang sampah, perubahan pola pikir ini dimulai dari diri sendiri yang melihat bahwa sampah memiliki nilai jika di kelola (Rozi, 2020).

Pengelolaan sampah tingkat rumah tangga di taregetkan mencapai 30 persen dan sisanya akan diberikan kepada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Tujuan dari himbauan ini adalah untuk menjaga ibu kota Jakarta terhindar dari pencemaran sampah dan menjaga kebersihan. Selain dari menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, juga terdapat sumber ekonomi dari memilah sampah dari rumah, karena saat ini sudah banyak bank sampah yang membuka diri untuk menerima sampah dengan jenisnya. Jika perubahan pola perilaku sudah berubah tentang bagaimana mengelola sampah dengan baik, maka yang akan merasakan

dampak baiknya adalah diri sendiri, keluarga dan anak-anak di masa depan (Rozi, 2020).

Berbagai program sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap penanganan sampah, kemudian dari LPBINU juga mulai melakukan hal yang sama. Tetapi pelaksanaannya akan jauh berbeda dengan pemerintah yang hanya memberikan peraturan dalam bentuk kebijakan wajib membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan un-organik. Kadang-kadang yang menjadi sampah orang lain justru bisa menjadi harta bagi orang yang lainnya. Ini merupakan satu hal yang menjadi permasalahan mendasar dalam penanganan sampah di rumah tangga (Interview, 4).

Terkait dengan tantangan dukungan publik yang paling utama adalah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat muslim. Karena pada dasarnya kebersihan merupakan sebagian dari keimanan masyarakat dan lingkungan. Sehingga kesadaran akan permasalahan sampah ini akan mudah di terima oleh masyarakat dan juga sampai kepada melakukan tindakan yang nyata mulai dari bijak menggunakan plastik, tidak membuang sampah kemasan dan bisa mengelola sampah secara sendiri (Interview, 4).

### **Tantangan Pendanaan**

Tantangan pendanaan organisasi dalam menjalankan tujuan pengurangan sampah yang ada di Indonesia, dijelaskan bahwa pendanaan BSN LPBINU sendiri pada awalnya hanya melakukan berbagai edukasi kepada masyarakat bagaimana untuk bisa meminimalisir penggunaan plastik, mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga dan yang ada di lingkungan sekitar. Sisa-sisa sampah ini baru kemudian diserahkan ke bank sampah. Kemudian untuk mengelola bank sampah nusantara juga pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan anggaran dari BSN sangat terbatas dan hanya mengandalkan donasi (Interview, 4).

Meskipun sampah-sampah yang diterima oleh bank sampah nusantara ini di olah menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual. Barang-barang dari hasil kreatifitas ini akan dipasarkan dan akan menghasilkan uang, akan tetapi untuk pemasaran sendiri dari barang-barang hasil kreatifitas ini masih belum optimal. Ini juga merupakan tantangan bagi penggiat lingkungan seperti bank sampah nusantara (Interview, 4).

Dalam mengelola sampah hasil sisa konsumsi, masyarakat juga belum mengembangkan potensi secara sistematis baik itu dari segi kreatifitas maupun kemampuan melihat nilai ekonomi dari olahan sampah. Sedangkan untuk mengelola sampah juga membutuhkan biaya dengan tingkat yang beragam, tetapi untuk dukungan investasi dari pihak swasta sangat minim dan bahkan tidak ada. Sedangkan dari pihak swasta juga harus ikut bersinergi dalam penerapan pemulihan permasalahan sampah. Ini merupakan tantangan yang harus segera diatasi.

BSN LPBINU juga melakukan kerjasama bersama dengan perusahaan yang sudah memiliki *mindset* terhadap penanganan sampah kemasan yang dihasilkan dari produk perusahaan. Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk kolaborasi kemitraan bersama dengan Coca-cola. Coca-cola membuka kemitraan bersama dengan bank sampah yang beroperasi di tujuh kota seperti pabrik yang ada di Medan, Lampung, Bekasi, Sumedang, Semarang, Surabaya dan Bali Denpasar (Interview, 4). Kemitraan yang dilakukan baru sebatas edukasi yang dilakukan bersama dengan bank sampah karena memang bank sampah merupakan pakar

dalam memilah sampah, termasuk juga Bang Sampah Nusantara (Interview, 4). Selain itu Coca-Cola juga melakukan dan memberikan hibah tong sampah kepada bank sampah yang ada di Indonesia dan berdekatan dengan pabrik Coca-Cola (Interview, 4). Hibah tong sampah ini bertujuan untuk pemilahan sampah organik dan non-organik dan mengurangi sampah limbah produk yang tidak dikelola.

Coca-Cola Amatil Indonesia bersama Dynapack Asia secara resmi meletakkan batu pertama pembangunan pabrik daur ulang *Polyethylene Terephthalate* (PET). Pabrik ini dibangun dengan tujuan komitmen dari Coca-Cola Amatil Indonesia untuk menciptakan siklus tertutup pada kemasan produk, tujuan ini mencapai 50 persen tingkat daur ulang atau energi terbarukan tahun 2030. Pabrik ini dibangun dengan biaya investasi sebesar 50,51 juta dolar AS atau setara dengan RP 556,2 miliar. Dengan investasi yang besar ini diharapkan mampu mencapai target untuk mencapai daur ulang kemasan produk Coca-Cola (Catriana, 2021).

Pabrik yang didirikan oleh Coca-Cola Amatil Indonesia ini akan mulai beroperasi pada tahun 2022, dengan mengurangi jumlah resin plastik baru yang akan digunakan perusahaan sekitar 25.000 ton setiap tahun. Sementara PT Amandina Bumi Nusantara Emmeline Hambali akan mendukung pengelolaan pabrik pengolahan daur ulang dan memastikan untuk pemenuhan hak asasi manusia dan regulasi dalam pengumpulan sampah. Kemudian, dengan adanya pabrik ini juga akan membantu pemulung dan masyarakat untuk fasilitas penerimaan sampah-sampah sisa produk (Catriana, 2021).

Bang sampah nusantara LPBI NU juga bekerjasama dengan Bank BNI. Kerjasama ini dalam bentuk tabungan dari masyarakat yang join pada BSN LPBINU. Masyarakat yang menabung sampah pada BSM akan di bukakan Rekening Tabungan BNI. Harapannya adalah masyarakat menjadi lebih banyak menjadi nasabah BSN. Kerjasama yang dilakukan oleh BSN bersama Bank BNI, juga bisa dilakukan oleh seluruh cabang BSN LPBINU di seluruh Indonesia. Saat ini menabung yang mudah adalah dimulai dari menabung sampah khususnya di bang sampah nusantara. Sehingga nasabah akan mudah memiliki tabungan bank BNI untuk menabung dalam bentuk awal yaitu sampah un-organik (Interview, 4).

## **KESIMPULAN**

Komitmen Indonesia untuk mengatasi masalah sampah plastik di perairan dilakukan melalui kolaborasi *multi*-pihak (multi-aktor) dalam wadah kerjasama NPAP bersama dengan GPAP. NPAP merupakan platform yang mempertemukan para pemangku kepentingan seperti, pemerintah, swasta-bisnis dan organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama berupaya mengurangi 70% sampah plastik di perairan Indonesia pada 2025.

Rencana dan tindakan awal kolaborasi yang dilakukan oleh NPAP-GPAP untuk mengurangi sampah plastik hingga 70% tahun 2025 memang perlu untuk diapresiasi. Namun, mengingat dekatnya batas waktu untuk mencapai target pengurangan sampah plastik ini, maka terdapat tantangan dalam mencapai target tersebut. Melalui analisis data yang ada, baik dari data primer (*interview*) maupun data sekunder (jurnal, buku, berita media dan web), maka tantangan-tantangan dimaksud adalah berkaitan dengan tantangan tata kelola yang baik (*good governance*), kebijakan dan program NPAP, dukungan publik dan pendanaan.

Dari empat tantangan di atas, maka peneliti memandang bahwa tantangan dukungan publik merupakan tantangan yang paling sulit untuk mencapai target NPAP. Hal ini mengingat masih rendahnya kesadaran publik, sedangkan pada saat yang sama, tanpa keikutsertaan publik dalam aksi-aksi nyata, maka kolaborasi NPAP-GPAP untuk mengurangi sampah plastik sangatlah sulit untuk dicapai. Untuk tantangan yang relatif ringan adalah terkait kebijakan dan program. Peneliti sepakat dengan para nara sumber, bahwa kebijakan dan program pemerintah sebenarnya sudah cukup baik meskipun tetap harus ditingkatkan, namun karena rendahnya dukungan publik, buruknya tata kelola yang baik (*good governance*) secara keseluruhan dan kurangnya pendaanaan, maka target pengurangan sampah plastik di perairan Indonesia hingga 70% pada tahun 2025 masih tidak dapat tercapai.

## REFERENSI

- Agustina, K. (2019, September 4). Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP). *WRI Indonesia*. Retrieved from <https://wri-indonesia.org/id/our-work/project/indonesia-national-plastic-action-partnership-npap>
- Aji, A. (2021). KKP Perangi Sampah Laut di Kota Dobo, Dengan Gerakan Cinta Laut. Retrieved from <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/31527-kkp-perangi-sampah-laut-di-kota-dobo-dengan-gerakan-cinta-laut>
- Bogdan, R. & T. S. (1992). *Pengantar metode kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Catriana, E. (2021, April 15). Coca-Cola Amatil Indonesia Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Senilai Rp 556,2 Miliar. *Kompas.com*. Retrieved from <https://amp.kompas.com/money/read/2021/04/15/190000825/coca-cola-amatil-indonesia-bangun-pabrik-daur-ulang-plastik-senilai-rp-556-2>
- Cresswell. (1994). *The Qualitative Paradigm*. University of Sheffield. Retrieved from [https://www.computing.dcu.ie/~hruskin/RM2.htm#:~:text=Acocording to Cresswell \(1994\) %22,conducted in a natural setting](https://www.computing.dcu.ie/~hruskin/RM2.htm#:~:text=Acocording to Cresswell (1994) %22,conducted in a natural setting)
- Dermawan, R. (2019). *Securitizing The Environment: A Case of Marine Debris in Indonesia*. Padang, Indonesia: Sciendo. Retrieved from <https://content.sciendo.com/downloadpdf/book/9783110678666/10.1515/9783110678666-019.pdf?pdfJsInlineViewToken=1544396433&inlineView=true>
- Furchan, A. (2004). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Garside, M. (2020). Global Plastic Production 1950-2019. *Statista.com*. Retrieved from <https://www.statista.com/statistics/282732-global-production-of-plastics-sice-1950/#statisticContainer>
- Getplastic. (2021). Tentang Get Plastic. Retrieved from <http://www.getplastic.org/tentang-kami.html>
- Haykal, I. (2021). Indonesia Darurat Sampah Plastik. Retrieved from <https://beritajatim.com/postingan-anda/indonesia-darurat-sampah-plastik/>
- Hermawan, S. (2019). Law and Economic Approach to Reduce Marine Plastic Litter in Indonesia, *Volume 358*. Retrieved from <https://www.atlantispress.com/proceedings/icglow-19/125920804>

- Medina. (2009). *Global Chains in Chinese and Indian Industrialization: Impact on Waste Scavenging in Developing Countries*, (UNU-MERIT, UNU-WIDER and UNIDO International Workshop).
- Mongabay.co.id. (n.d.). Prinsip Tata Kelola Yang Baik. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/tata-kelola-prinsip-tata-kelola-yang-baik/>
- Narimawati, U. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Media Agung.
- Rosadi, F. (2019). Media Keuangan, Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal: Bumi Dalam Kantong Plastik. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia, VOLUME XIV*(NO. 144). Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/media/13301/mk-september-2019-reupload.pdf>
- Roser, H. R. dan M. (2018). Plastic Pollution. Retrieved from <https://ourworldindata.org/plastic-pollution#note-1>
- Rozali, A. (2018). LPBI NU: Tanggap Darurat Bukan Hanya Memberi Bantuan. Retrieved from <https://www.nu.or.id/post/read/94420/lpbi-nu-tanggap-darurat-bukan-hanya-memberi-bantuan>
- Rozi, K. (2020). Anies: Masyarakat Harus Ubah Mindset Tentang Sampah. Retrieved from <https://m.ayojakarta.com/read/2020/02/21/12295/anies-masyarakat-harus-ubah-mindset-tentang-sampah>
- Rukhin. (2018a). LPBI NU DKI Jakarta Luncurkan Bank Sampah. Retrieved from <http://lpbi-nu.org/lpbi-nu-dki-jakarta-luncurkan-bank-sampah/>
- Sandjaya, R. (2018). Get Plastic, Komunitas Pengolah Bahan Bakar Minyak dari Limbah Plastik. *GoodNews From Indonesia*. Retrieved from <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/08/03/get-plastic-komunitas-pengolah-bahan-bakar-minyak-dari-limbah-plastik>
- Scott Burchill, et al. (2005). *Theories of International Relations* (Third Edit). New York: Palgrave Macmillan.
- Sedekah Sampah Sebagai Solusi Lingkungan Sehat. (2021). Retrieved from <https://maritim.go.id/sedekah-sampah-sebagai-solusi-lingkungan-sehat/>
- Sejauh Manakah Inovasi Pengelolaan Sampah di Indonesia? (2019). Retrieved from <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2019/10/19/sejauh-manakah-inovasi-pengelolaan-sampah-di-indonesia>
- Shahab, N. (2021). Indonesia Menghadapi Darurat Sampah Plastik. Retrieved from [https://chinadialogueocean-net.translate.goog/17615-indonesias-plastic-waste-emergency/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=ajax,nv,sc,elem](https://chinadialogueocean-net.translate.goog/17615-indonesias-plastic-waste-emergency/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=ajax,nv,sc,elem)
- Nasional Penanganan Sampah Plastik Di Laut 2019-2024. *E-ISSN:2684-8082, Vol. 1 No.* Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/padjir/article/view/21590/10378>
- SIPSN.menlhk. (2020). Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah. Indonesia. Retrieved from <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Statistik Persampahan Indonesia. (2008). *Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KNLH)*.

Sumartiningtyas, H. K. N. (2020). Indonesia Hasilkan 64 Juta Ton Sampah, Bisakah Kapasitas Pengelolaan Tercapai Tahun 2025? *Kompas.com*. Retrieved from <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/18/070200023/indonesia-hasilkan-64-juta-ton-sampah-bisakah-kapasitas-pengelolaan?page=2>

Suwanrumpha, L. (2021). Great Pasifik Garbage Patch, Genengan Sampah Terbesar Laut. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210609072930-199-651986/great-pasific-garbage-patch-genangan-sampah-terbesar-laut>